

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenada Media
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPAUUPR-UUPLH, PT*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syahrums. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Emiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkulu: Dotlus Publisher
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2003. *Naskah akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*. Jakarta: Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2003
- Rita Abrahamsen. 2000. *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: Lafadl
- Rahardjo, Satjipto. 2012 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Susanti Adi Nugroho. 2010. *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana
- Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Remaja Rosdakarya
- Urip Santoso. 2012 *Hukum. Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana
- Urip Santoso. 2019. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media
- Z.A Sangadji. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang nomor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima; Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Mataram Nomor 53/G/2018/PTUN.Mtr.

C. Jurnal :

Afifa Rangkuti. 2017. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam",Tazakiya Jurnal Pendidikan Islam, Volume VI Nomor 1

Ajeng Sarinastiti, R. Siti Rukayah dan Titin Woro Murtini. 2015. "Konsep Waterfront Pada Pemukiman Etnis Kali Semarang". Program Studi Magister Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Tekhnik, Vol 36

Antik Bintari, Talolo Muara. 2018. Manajemen konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Jakarta. Program Studi Ilmu Pemerintahan

- Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". Yustisia, Volume 3 Nomor 2
- Bramasta Putra Redyantanu dan Benny Poerbantano. 2018. "Pengembangan Potensi Visual Semenanjung Lawata sebagai Salah Satu Simpul Rangkaian Wisata Tepian Air Kota Bima". Humaniora. Vol 15 Nomor 2
- B. Tirie., J.J. Sondakh., S.K. Walandouw. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb-P2 Sebagai Sumber Pad Di Kota: Tomohon, Manado, dan Bitung. Jurnal Pajak EMBA Vol.4 No.2.
- Emerson Yuntho. 2007. "Class Action Sebuah Pengantar". Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM
- Fika Nurul Aulia. 2016. "*Tinjauan Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/TUN/2011*". Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara
- Hariyanto Agus Dwi, Poerbantano, Benny, Redyantanu, Bramasta Putra. 2016. "*Identifikasi Visual Arsitektur Lokal Kota Bima*", Seminar Nasional-Semesta Arsitektur Nusantara 4
- Marsha Cikitha Arviana. 2019. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta*. Universitas Ahmad Dahlan: Fakultas Hukum
- Muhammad Helmi. 2015. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam". Mazahib. Volume XIV Nomor 2
- Petrus Hardana. 2011. *Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional
- Rokhmin Dahuri. 2019. "Peluang Ekonomi Tinggi dari Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut". Ubb Perspective, Universitas Bangka Belitung
- Samir. 2021. "*Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat Di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat*". (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Sabtanto Joko Suprpto. 2008. “*Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian*”, Buletin Sumber Daya Geologi, Volume 3 Nomor 1

Sutrisno, Fenti Puluhuwa, Lusiana Margareth Tijow. 2020. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. Gorontalo Law Review. Volume 3 Nomor 2

Syamsudin, Junaidin. 2017. “Analisis Kebijakan engembangan Kota Bima Sebagai Kota Tepian Air”. Jurnal Admnistrasi Negara. Volume 14 Nomor 3

Urip Santoso. 2015. “Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai”. Mimbar Hukum. Volume 27 Nomor 2 Juli

D. Internet :

Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2017-2021 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang diakses di http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_150494338404_PROFIL_WILAYAH_KOBI_-_2016.pdf, pada hari Senin, 16 November 2020 pukul 19.07 WIB

Rayhan Dudayev, “Menyoal Regulasi Reklamasi.”, Kompas.com, 28 Juni 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/28/08120041/Menyoal.Regulasi.Reklamasi> Diakses tanggal 1 Mei 2021, Pukul 17.00 WITA.

Metromini.info, “Tokoh Intelektual Dara Kupas Masalah Timbunan di Watasan Amahami”, 12 November 2016, <http://www.metromini.info/2016/12/tokoh-intelektual-dara-kupas-masalah.html> Diakses tanggal 2 Mei 2021, Pukul 08.30 WITA

Uki, “Warga Tolak Reklamasi Pantai Amahami”, Suarantb.com, 15 November 2016 <https://www.suarantb.com/2016/11/15/warga-tolak-reklamasi-pantai-amahami/> Diakses tanggal 2 Mei 2021, Pukul 08.30 WITA

Uki, “Reklamasi Pantai Amahami Bima Digugat Masyarakat”, Suarantb.com, 24 November 2018 <https://www.suarantb.com/2018/11/24/reklamasi-pantai-amahami-bima-digugat-masyarakat/> Diakses tanggal 5 Mei 2021, Pukul 21.30 WITA

Riz, “Kepala Wakapolres Bima Berlumuran Darah Akibat Demo Anarkis”, Liputan6.com, 05 September 2014, <https://www.liputan6.com/news/read/2101185/kepala-wakapolres-bima-berlumuran-darah-akibat-demo-anarkis> Diakses tanggal 5 Mei 2021, Pukul 21.30 WITA

LAMPIRAN